

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anandya, Dicky dan Lalola Easter, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, *Kompendium Pidana Suap*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Korupsi*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch, 2015, *Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, Bebuku Publisher, Surakarta.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, *Menebar Benih Antikorupsi: Laporan Tahunan KPK 2022*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Lampung.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, 2019, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Santoso, Bambang, *Politik Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Schmidt, H.G., 2012, *Private Remedies for Corruption towards an International Framework*, Eleven International Publishing, Netherlands.
- Soekanto, Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Susanti, Dwi Siska dan Nadia Sarah, 2016, *Dasar Hukum tentang Korupsi terkait Sektor Bisnis*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption*, United Nations, New York.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

C. Jurnal

Angkouw, Kevin, 2014, "*Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan*", Jurnal Lex Administratum, Vol. 2, No. 2, 2014.

Golonggom, Muhammad Nurfauzi, Berlian Manopo dan Attie Olli, 2021, "*Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*", Jurnal Lex Crimen, Vol.10, No. 5, 2021.

Gunawan, Yopi dan Kristian, 2018, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption dan Pembaharuan Hukum Pidana*", Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No.1, 2018.

Hadad, Thoriq, *Et. Al.*, 2017, "*Di Balik Investigasi Tempo 01*", PT Tempo Inti Media Harian.

Hiariej, Eddy O.S, 2019, "*United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum di Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, 2019.

Hidayat, Reza, 2015, "*Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*", e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 12, 2015.

Manan, Abdul, 2018, "*Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003*", Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu, Vol. 2, No. 2, 2018.

Marbun, Andreas Nathaniel, 2017, "*Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?*", Jurnal Integritas KPK, Vol. 3, No. 1, 2017.

Meilytia, Audifirdha dan Elly Sudarti, 2023, "*Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*", Pampus Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 2, 2023.

Mulyati, Nani, 2023, "*Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Sektor Private di Negara Asean*", UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, 2023.

Napitupulu, Daniel Juara, Umi Rozah, dan Sukinta, 2021, "*Kebijakan Kriminalisasi Penyusunan Sektor Swasta sebagai Delik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Diponegoro Law Journal, Vol. 10, No. 2, 2021.

Nurlaily, Hasrina dan Rusmilawati Windari, 2022, "*Reformulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia dengan New Zealand*", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, 2022.

Prahassacitta, Vidya, 2017, "*Tinjauan atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyusunan di Sektor Privat dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan dengan Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-47, No. 4, 2017.

- Suryanto, Ahmad Fahd Budi, 2021, “*Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup dan Gratifikasi di Indonesia*”, Jurnal Dharmasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Tawang, Dian Adrian Dg, 2020, “*Suap dalam Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*”, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Valerian, Dion, 2021, “*Meretas Konsep Baru Pidana Denda terhadap Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Antikorupsi Integritas KPK, Vol. 5, No.2, 2021.
- Wijayanti, Rizki, Yuliati, Prija Djatmika, 2024, “*Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum Tata Negara, Administrasi, dan Pidana, Vol. 3, No. 1, 2024.

D. Skripsi

- Firmansyah, Ogi, 2020, “*Tindak Pidana Suap Dalam Proses Perizinan Industri yang Dilakukan oleh Bupati Subang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Sarjana Universitas Pasundan, Bandung.
- Irawan, Doddy Irdendi, 2015, “*Analisis Pemberian Parcel Kepada Pegawai Negeri Sipil Sebagai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Lampung.

E. Disertasi

- Danil, Elwi, 2001, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*”, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok.

F. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada Senin, 23 Oktober 2023, pukul 21.49 WIB.

G. Internet

- Bundesgerichtsonstiges, 7B_133/202, https://entscheidsuche.ch/dok/CH_BGer/CH_BGer_999_7B-133-2022_2023-08-14.html, diakses pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 10.30 WIB.
- Cahyana, Fariz Cahyana dan Muhammad Helmi, “*Private Bribery, Suap di Sektor Swasta*”, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/opini/1973138403/private-bribery-suap-di-sektor-swasta?page=2>, diakses pada Rabu, 15 Mei 2024, pukul 07.51 WIB.
- Geertsma, Jurjan, “*Overview on Anti-Corruption Rules and Regulations in the Netherlands*”, [20160131_ACE_CountryreportNL.pdf \(ecba.org\)](https://www.acecountryreport.nl/pdf/20160131_ACE_CountryreportNL.pdf), diakses pada Jumat, 17 Mei 2024, pukul 21.35 WIB.
- Hukum Online, “*Belum Ada Satu Orang pun yang Dihukum Pengadilan karena Suap*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-ada-satu-orang-pun-yang-dihukum-pengadilan-karena-suap-hol9276/?page=all>, diakses pada Jumat, 17 Mei 2024, pukul 20.10 WIB.
- Indonesia Corruption Watch, “*Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi*”, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-kejahatan-terorganisasi>, diakses pada Rabu, 24 April 2024, pukul 20:15 WIB.
- International Financial Law Review, “*Switzerland: Private Sector Bribery*”, <https://www.iflr.com/article/2a63ej1tpk40uxrfqjt34/switzerland-private-sector-bribery>, diakses pada Jumat, 17 Mei 2024, pukul 22.20 WIB.
- Kompas.com, “*Rachel Vennya dan Penerima Rp 40 Juta Tak Dijerat Pasal Suap karena Bukan Penyelenggara Negara*”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/17/14383921/rachel-vennya->

- [dan-penerima-rp-40-juta-tak-dijerat-pasal-suap-karena-bukan?page=all](#), diakses pada Kamis, 7 Desember 2023, pukul 20:54 WIB.
- MarkusBerni dan Philippe Monnier, “*Anti-Corruption in Switzerland*”, <https://www.globalcompliance.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-switzerland/>, diakses pada Jumat, 17 Mei 2024, pukul 23.18 WIB.
- Media Indonesia, “PBB: USD 2,6 Triliun Dikorupsi Setiap Tahunnya”, <https://mediaindonesia.com/internasional/276514/pbb-us26-trililiun-dikorupsi-setiap-tahunnya>, diakses pada Rabu, 24 April 2024, pukul 20:24 WIB.
- Molina, Martin dan Sandro Stich, “*The Swiss Legal System and Research*”, <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Switzerland1.html>, diakses pada Minggu, 16 Juni 2024, pukul 21.14 WIB.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, “*Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia*”, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>, diakses pada Selasa, 31 Oktober 2023, pukul 21.47 WIB.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, “*Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>, diakses pada Kamis, 26 Oktober 2023, pukul 13.25 WIB
- Pusat Edukasi Antiorupsi, “*Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>, diakses pada Selasa, 31 Oktober 2023, pukul 21.05 WIB.
- Rechtbank Rotterdam, Zaaknummer: 83-104480-22, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:3761>, diakses pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 06.10 WIB
- Sukmana, Yoga, “*Korupsi di Sektor Swasta Lebih “Gila”*”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/07304001/korupsi-di-sektor-swasta-lebih-gila>, diakses pada Sabtu, 9 Desember 2023, pukul 11.48 WIB.
- Veda, Avila, “*Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, diakses pada Kamis, 26 Oktober 2023, pukul 12.49 WIB.